

Implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karawang dalam menumbuhkan pemahaman nasionalisme generasi muda Nahdhatul Ulama

Aris Riswandi Sanusi ¹, Fitri Silvia Sofyan ²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh GP Ansor Kabupaten Karawang serta peran ulama Nahdhatul Ulama terhadap pembentukan dan menumbuhkan pemahaman nasionalisme generasi muda Nahdhatul Ulama sesuai dengan komitmen Nahdhatul Ulama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penggunaan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur dengan teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu pendidikan politik merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan agar tercipta kader yang memahami politik sebelum terjun di masyarakat. Begitu pula kader harus diberikan pemahaman pula terkait nasionalisme sebagai dasar tindakan politik yang didasari hadis *Hubbul Wathan Minal Iman*. Adapun pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan GP Ansor Kabupaten Karawang meliputi Pelatihan Kader Dasar dan pengembangan kader yang dilakukan dalam bentuk diskusi, pelatihan pengembangan profesi, pendidikan bela negara, dan pelatihan ekonomi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

ABSTRACT

*This study aims to describe the implementation of political education carried out by GP Ansor Karawang and the role of NU ulama in forming an understanding of the nationalism of the younger generation of Nahdhatul Ulama in accordance with Nahdhatul Ulama's commitment to the Republic of Indonesia. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, document study, and literature study with data processing techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The result of this research is political education is an important part that must be implemented in order to create cadres who understand politics before joining the community. Likewise, cadres must also be given an understanding of nationalism as the basis for political action based on the hadith of *Hubbul Wathan Minal Iman*. The implementation of political education by GP Ansor Karawang includes basic training and development in the form of discussions, professional development training, state defense education, and economic training *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)*

Sejarah Artikel

Diterima : 15 Nov 2018

Disetujui: 12 Nov 2020

Kata kunci:

pendidikan politik,
nasionalisme, Ansor

Keywords:

*Political education,
nationalism, Ansor*

Pendahuluan

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya arus teknologi dan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda Indonesia sebagai calon penggerak roda kehidupan negara. Media-media sosial dalam perjalanannya bukan hanya membawa dampak kemajuan namun secara bersama membawa ancaman tersendiri bagi generasi muda yang dapat menyebabkan luntarnya local wisdom Indonesia. Banyak dijumpai perilaku generasi muda yang kehilangan jati diri sebagai bangsa berwibawa di atas khasanah kekayaan budaya bangsa yang multikultural dan plural.

Salah satu perbedaan utama antara masyarakat tradisional dan modern adalah tingginya partisipasi warga negara dalam politik dan adanya sistem politik terbuka (Huntington, 2006). Dalam konteks kehidupan politik bangsa, generasi muda yang memiliki minat dan kemampuan untuk berpolitik justru diarahkan hanya untuk menjalankan politik praktis yang berdasarkan pada kepentingan kelompok semata tanpa memandang kepentingan mulia sebagai warga negara. Sebagai contoh banyak ditemui politisi yang tersandung kasus korupsi sebagai dampak pendidikan politik sepihak atas nama kelompok tertentu. Begitu pula perkara terorisme yang akhir-akhir ini menjadi suatu isu nasional serta global merupakan permasalahan bersama yang justru pelakunya adalah pemuda-pemuda yang telah diberikan pendidikan politik sepihak oleh golongan teroris. Tidak dapat dimungkiri bahwa terorisme merupakan bagian dari dinamika politik kenegaraan, namun dalam konteks nasional, terorisme merupakan sikap politik yang jauh dari filosofis bangsa yang telah dirumuskan dalam Pancasila. Begitupun dalam konteks internasional, terorisme merupakan suatu pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Hal tersebut menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai negara yang berketuhanan dan berperikemanusiaan yang harus ditemukan solusinya. Terlebih jika berkaca pada peran pemuda yang diharapkan di Indonesia seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa pemuda harus menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Salah satu dari segala solusi yang ditawarkan oleh banyak kalangan adalah melalui pendidikan. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Nampak jelas bahwa pendidikan menjadi salah satu solusi yang seharusnya ditonjolkan dalam membentuk generasi muda yang baik dan cerdas. Dalam konteks pemuda sebagai solusi atas masalah kebangsaan dan kenegaraan, pendidikan politik menjadi salah satu solusi ampuh yang diharapkan dapat membentuk pemuda yang mampu berperan sebagai negarawan penggerak roda kehidupan negara. Pemuda merupakan ujung tombak bagi suatu negara. Maju mundurnya suatu negara menjadi tanggung jawab yang harus dibebankan pada para pemuda. Hal tersebut berangkat dari pentingnya peran pemuda sebagai ujung tombak pembangunan nasional seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 16 yang berbunyi “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Begitu pula karakteristik pemuda seperti pada UU RI No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 6 yaitu “memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik”, menjadi pendukung terhadap asumsi dasar terkait peran penting pemuda dalam roda kehidupan negara. Dengan demikian perlu pewarisan nilai bagi generasi muda dengan sosialisasi nilai-nilai tersebut. Sosialisasi bukan tentang menyesuaikan diri dengan institusi, norma dan nilai, namun lebih pada generasi muda sebagai agen kreatif dalam kehidupan politik (Amnã et al., 2009). Sosialisasi politik ditangani sebagai komunikasi yang dapat diamati dan praktik pembuatan makna, sehingga menyiratkan pendekatan subjektif, situasional, relasional, partisipasi, dan berorientasi tindakan untuk menangkal risiko memperlakukan generasi muda sebagai objek depolitisasi (Andersson, 2020).

Dalam hal ini, terdapat salah satu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki komitmen penuh terhadap Indonesia adalah Nahdhatul Ulama yang memiliki organisasi kepemudaan yaitu Gerakan Pemuda Ansor. Komitmen GP Ansor menjadikannya sebagai organisasi kepemudaan (OKP) yang fokus terhadap pembentukan pemuda menjadi negarawan berhaluan Islam dan nilai-nilai budaya bangsa. Dapat dijumpai para aktor-aktor politik jebolan GP Ansor tersebut yang berperan dalam peta politik Indonesia. Mengingat komitmen NU terhadap NKRI menjadikan GP Ansor sebagai objek penelitian pendidikan politik yang berhaluan Islam dan menjunjung nilai-nilai budaya bangsa yang dapat menumbuhkan pemahaman nasionalisme generasi muda Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini diambil didasarkan pada tujuan penelitian melakukan pengumpulan data lapangan dari informan dalam keadaan alamiah, sehingga data yang dikumpulkan bersifat natural. Dalam kondisi ini, informan dapat memberikan data yang lebih komprehensif dengan pengaruh dari lingkungan sosialnya. Selain itu, melalui pendekatan kualitatif diharapkan pula peneliti mendapatkan informasi yang mendalam terkait upaya GP Ansor dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi generasi muda NU serta dapat ditemukan peran ulama NU dalam pembentukan pemahaman nasionalisme menurut konsepsi nahdhiyin. Adapun pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemuda merupakan golongan pembaharu yang memiliki tempat penting dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Banyak ditemukan dalam catatan sejarah bangsa bahwa peran pemuda sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia dari mulai masa penjajahan yang berpuncak pada peristiwa sumpah pemuda sebagai titik tolak awal persatuan pemuda Indonesia. Berangkat dari sejarah panjang pemuda tersebut sudah sepantasnya pemuda saat ini kembali menunjukkan peran pentingnya dalam usaha memajukan bangsa Indonesia yang terus mengalami permasalahan kebangsaan. Hal ini menjadi tugas bersama seluruh elemen kebangsaan untuk menumbuhkan kembali kobor semangat kebangsaan bagi para pemuda, salah satunya menjadi dasar pikir organisasi kepemudaan GP Ansor. Catatan sejarah lainnya yang menjadi dasar pemikiran GP Ansor adalah peran pemuda NU yang melakukan perlawanan keras terhadap agresi Belanda yang datang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Semangat perjuangan pemuda dalam catatan-catatan sejarah tersebut menjadi alasan kuat bagi GP Ansor untuk merevitalisasi peran pemuda bagi Indonesia dewasa ini. Hal ini didasarkan pula pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 16 yang berbunyi “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Serta karakteristik pemuda seperti pada UU RI No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 6 yaitu “memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik”. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, pemuda memiliki tempat penting dalam usaha pembangunan nasional dari mulai pembangunan infrastruktur maupun suprastuktur terutama dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Pentingnya peran pemuda ini tidak lain disebabkan pemuda memiliki semangat kejuangan dan tanggung jawab sehingga mampu bersikap kritis terhadap kondisi bangsa dan mampu mempersiapkan kemajuan bangsa yang dilandasi sikap futuristik pemuda. Hal ini menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa pemuda menjadi tombak perubahan dan perbaikan bangsa.

Masalah yang muncul dewasa ini terletak pada beban berat bagi para pemuda dalam menanggung peran pentingnya terhadap kemajuan bangsa sedangkan kondisi pemuda yang seakan cenderung terus mengalami kemunduran. Masalah-masalah tersebut disebabkan ketidaksiapan pemuda dalam menghadapi pesatnya perkembangan globalisasi yang menyerang segala aspek kehidupan pemuda. Pesatnya globalisasi membawa dua sisi bagi kehidupan pemuda baik dipandang dari nilai kemanfaatan maupun kemudharatan. Keterbukaan informasi global memberikan keluasan pemahaman pemuda terhadap segala informasi sehingga menjadi sumber referensi pemikiran pemuda ke arah kemajuan bangsa. Namun di sisi lainnya, nilai kemudharatan berdampingan dengan nilai kemanfaatan yang dibawa dari informasi global tersebut. Kecenderungan informasi tersebut berdampak pada sikap individual dari golongan pemuda dan

kebingungan pemuda yang berdampak pada tergesurnya jati diri bangsa dikarenakan terlalu terbuka terhadap informasi global tanpa disaring terlebih dahulu. Akar dari permasalahannya terletak pada hilangnya kedewasaan pemuda dalam menyikapi perkembangan zaman. Hal ini menjadi masalah besar jika terus menerus diabaikan karena akan berdampak lebih besar terhadap perkembangan generasi muda yang kelak akan meneruskan tugas dalam menjalankan roda kenegaraan.

Tugas seluruh elemen bangsa adalah untuk memberikan solusi permasalahan pemuda demi keberlanjutan kehidupan negara. GP Ansor menyadari akan permasalahan tersebut sehingga memandang pendidikan sebagai alternatif utama yang harus diselenggarakan bagi para pemuda, salah satunya pendidikan politik bagi pemuda Ansor dan umumnya bagi para pemuda NU. Hal ini dikarenakan pendidikan politik memiliki tempat dalam usaha untuk menciptakan pemuda yang bertanggung jawab selaras dengan pandangan bahwa pendidikan politik merupakan persiapan ketika individu akan memiliki kesempatan untuk memikirkan masalah politik dan membentuk keputusan pribadinya untuk kepentingan publik (Nilgun et al., 2015). Dalam demokrasi perwakilan seperti di Indonesia bentuk pemerintahan mendapatkan kekuasaannya dari partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, maka apabila warga menghindari politik, sistem sosial akan kehilangan fungsi legitimasi (Yoldaş, 2015).

Pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan GP Ansor tersebut didasarkan pada tujuan pendidikan politik itu sendiri, seperti tercantum dalam INPRES RI No. 12 tahun 1982 yaitu menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia seutuhnya, yang perwujudannya akan tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya yang (1) sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan, (2) secara sadar taat pada hukum dan Undang-Undang Dasar, (3) memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional, (4) berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan pada kemampuan objektif bangsa, (5) secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis, (6) aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha, (7) aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa, (8) sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang, dan (9) mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Pentingnya pendidikan politik dirasakan sebagai upaya membentuk pemuda agar memiliki kesadaran serta mampu respon terhadap keadaan sosial masyarakatnya. Jika pendidikan politik dilaksanakan dengan baik dan sistematis maka dapat menumbuhkan kekuatan tandingan yang demokratis dan positif, serta kekuatan kritis dalam memerangi situasi tidak sehat, kondisi yang tidak adil dalam mewujudkan kondisi dan iklim sosial yang lebih baik dan lebih demokratis (Kurniadi, 2019). Maka melalui pendidikan politik, pemuda Ansor disiapkan untuk mampu memahami kondisi bangsa serta mampu dan mau untuk bertindak ke arah perubahan dengan dasar tanggung jawab yang berlandaskan nilai Islam dan Indonesia. Maka jelas nyatanya pendidikan politik ini menciptakan pemuda Ansor yang mampu dan mau bertindak dalam kehidupan negara dengan dilandasi sikap tanggung jawab terhadap negara. Penyelenggaraan pendidikan politik harus menyentuh tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai prosedural. Hal ini menjadi alasan penyelenggaraan pendidikan politik berdasar pada kurikulum pendidikan politik ini sepenuhnya lengkap menyentuh semua aspek seperti yang telah terkandung pada esensi pendidikan.

Dasar tanggung jawab terhadap negara diartikan sebagai perilaku yang dilakukan pemuda harus dilandasi oleh nilai religius dan nilai budaya. Nilai religius ini berpangkal pada prinsip Islam yang *Rahmatan lil 'alamin* sedangkan nilai budaya didasari oleh karakteristik bangsa Indonesia yang multikultural dan plural. Pendidikan politik menjadi proses yang mesti dilakukan dalam membentuk sikap tanggung jawab yang didasari kedua nilai tersebut. Adapun dasar nilai budaya Indonesia ditujukan agar tindak laku pemuda Ansor sesuai dengan rasa nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan gambaran dasar terkait rasa kepemilikan yang dimiliki individu terhadap suatu golongan atau bangsa dalam arti sempit. Nasionalisme Indonesia dibangun dari akar sejarah yang panjang dan berliku. Latar belakang sosial masyarakat Nusantara pada saat itu, terutama Jawa, memberikan andil bagi tumbuh dan berkembangnya semangat nasionalisme baik kiri maupun kanan (Fakih, 2014; Roberts, 2010)

Pada awal berkembangnya pengertian nasionalisme, Guido Zernatto (Ritter dalam Adisusilo, 2011: 4). memaknai kata nation berasal dari kata Latin *nation* yang berakar pada kata *nascor* yang berarti "saya lahir", maka pada awalnya *nation* (bangsa) dimaknai sebagai "sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama" (*group of people born in the same place*). Setiap budaya yang berkembang pada masyarakat Indonesia mengajarkan untuk tidak melupakan tempat kelahiran dan bertanggung jawab terhadap tempat kelahiran tersebut. Hal ini mendasari pendidikan penyelenggaraan pendidikan politik melalui materi ke-Indonesia-an ditujukan untuk memperkuat pemahaman pemuda Ansor terkait keanekaragaman bangsa terlebih tanah tempat kelahirannya. Selanjutnya, kata '*nasionalisme*' menurut Abbe Barruel (Ritter dalam Adisusilo, 2011: 4) untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu (di kampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka. Dari kedua pandangan pakar tersebut, nasionalisme dimaknai sebagai sebuah ungkapan dan tindakan yang menggambarkan identitas budaya kedaerahan pada suatu golongan. Melalui materi ke-Indonesia-an memberi pemahaman identitas budaya tidak serta-merta hanya terfokus pada budaya lokal namun selanjutnya memberikan pemahaman terhadap budaya nasional kepada seluruh pemuda Ansor sebagai dasar tindakan yang mencerminkan perilaku kebangsaan Indonesia. Smith (2002) memaknai nasionalisme sebagai gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi dan individualitas bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk atau menentukan satu bangsa yang sesungguhnya atau yang berupa potensi saja. Maka melalui pendidikan politik yang menekankan pada pendidikan diri diharapkan setiap pemuda Ansor memiliki pandangan hidup kebangsaan yang didasarkan oleh pemahaman perbedaan budaya pada bangsa Indonesia. Maka dari itu, dalam konteks Indonesia yang mengklaim sebagai negara demokrasi, warganya harus memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan demokrasi. Warga muda sebagai ujung tombak peradaban di masa depan perlu ditanamkan konsep, nilai dan implementasi kehidupan demokrasi (Arpanudin & Aulia, 2020).

Penyelenggaraan pendidikan politik oleh GP Ansor dilakukan melalui PKD dengan materi keindonesiaan serta sejarah Aswaja dan bangsa. GP Ansor menerapkan politik nasionalisme religius (Ghozali, 2020). Catatan sejarah bangsa, peran pemuda yang memiliki tempat penting dijadikan bahan pembelajaran politik oleh GP Ansor untuk mengembalikan semangat juang pemuda Ansor dewasa ini. Pelaksanaan pendidikan politik GP Ansor melalui materi-materi dalam pengaderan yang bertitik pada materi keislaman dan keindonesiaan ditujukan untuk membentuk karakter pemuda Ansor. Pendidikan politik dalam pandangan GP Ansor membentuk karakter kepemimpinan pada generasi muda NU di Indonesia (Sanusi & Darmawan, 2016). Karakter yang dibangun dalam pendidikan politik organisasi GP Ansor, yaitu religius, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kejujuran, amanah, peduli antar sesama, kerja sama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, kepemimpinan, toleransi, dan nasionalisme (Widiatmaka et al., 2016).

Adapun konsepsi nasionalisme di Indonesia pada mulanya merupakan suatu rasa kesamaan nasib yang dimiliki oleh setiap suku yang ada sehingga catatan sejarah masa kolonial, nasionalisme merupakan semangat kedaerahan untuk memperjuangkan daerah dari penjajah. Semangat kesamaan nasib yang terjadi di pelosok Indonesia menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia untuk mempersatukan semua suku yang sama-sama dijajah agar dapat mencapai tujuan kehidupan yang lepas dari penjajahan. Hal ini yang menjadi semangat para pemuda untuk menyatakan kesamaan nasib atas Indonesia pada sebuah momen kebangkitan nasional dan sumpah pemuda. Semangat tersebut yang menjadi corak perjuangan bangsa Indonesia berdasar pada kesamaan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan sehingga tercapai perjuangan bangsa Indonesia atas nama Indonesia bukan kedaerahan. Hal ini dikarenakan muncul pemahaman nasionalisme sebagai suatu ideologi pemelihara negara bangsa.

Kemajemukan bangsa Indonesia satu sisi menjadi roh bagi para pemuda bahwa Indonesia akan menjadi suatu negara yang kukuh berdiri di atas perbedaan, mengingat kemajemukan Indonesia merupakan senjata Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa. Ikatan emosional budaya menjadi pengikat bahwa perlu adanya kesamaan persepsi dan rasa kepemilikan terhadap Indonesia sehingga memunculkan konsepsi nasionalisme Indonesia. tidak bisa kita lupakan pula, sejarah kebesaran Majapahit yang mampu menyatukan Nusantara sebagai roh atau semangat agar Indonesia mampu bersatu untuk menjadi negara yang kuat. Lan & Manan (2011) menyebutkan bahwa nasionalisme Indonesia sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan multikultural dengan keanekaragaman dan kompleksitas budayanya

Berkaca dari pemaparan tersebut, konsepsi nasionalisme Indonesia merupakan suatu sara pemersatu bangsa di atas kondisi Indonesia yang majemuk dan memiliki kecenderungan untuk terjadi disintegrasi bangsa. Konsepsi nasionalisme adalah modal utama bangsa Indonesia agar mampu mencapai tujuan kehidupan kebangsaan seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan hukum kehidupan bangsa Indonesia. konsepsi nasionalisme Indonesia menjadi jawaban atas dampak adu domba yang diterapkan pada masa kolonial yang sampai saat ini menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. juga sebagai jawab atas kondisi Indonesia agar terlepas dari kebodohan dan kemiskinan yang diajarkan oleh para kolonial. Semangat nasionalisme adalah semangat kebersamaan untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia, dengan tidak membedakan suku, agama, ras, warna kulit, gender atau golongan. Maka, hari ini Indonesia bukan sekadar membutuhkan suatu konsepsi nasionalisme yang hanya menjadi santapan dalam pendidikan, kini saatnya pendidikan harus menjadi aktor realisasi konsepsi nasionalisme menjadi suatu pemahaman utuh yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Realita penyelenggaraan pendidikan politik GP Ansor dalam membentuk sikap nasionalisme pemuda Ansor dihadapkan pada kendala yang harus dipecahkan. Beberapa kendala yang dihadapi GP Ansor terletak pada permasalahan sikap masyarakat yang kurang mendukung penyelenggaraan pendidikan politik, masalah pendanaan organisasi, dan pesatnya teknologi informasi. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usah-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan membohongi rakyat belaka-; sulit pula untuk mengajak mereka untuk berpikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak di antara massa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).

Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas situasi sosial dan politik di sekitar dirinya. Para penguasa yang otoriter cenderung

tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan.

Kondisi politik bangsa saat sedang mengalami kemunduran yang dibuktikan dengan maraknya praktik korupsi berdampak pada pandangan negatif masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap kehidupan politik Indonesia. sikap negatif masyarakat seperti ini sangat berdampak pada kegiatan GP Ansor yang bersifat praksis lapangan seperti program pengenalan lapangan/*rihlah* dan naik turunnya calon kader GP Ansor. Pemuda hari ini lebih cenderung asyik dengan kehidupan yang individualis dari pada memikirkan kehidupan bangsa. Di sisi lain, kondisi masyarakat seperti ini menjadi pembelajaran bagi kader dalam mengamati permasalahan masyarakat dan diskusi pemecahan masalah tersebut. Selain itu, dukungan pemerintah yang dirasakan kurang terhadap penyelenggaraan pendidikan politik ini. Kecenderungan pemerintah hari ini seakan hanya fokus terhadap ekonomi saja dan mengesampingkan program pendidikan terlebih pendidikan kemasyarakatan.

Kendala selanjutnya terletak GP Ansor merupakan bukan organisasi profit sehingga memiliki masalah tersendiri dalam hal pendanaan organisasi. Masalah pendanaan ini menjadi masalah kronis namun dalam prinsip GP Ansor bukan menjadi masalah besar karena pendidikan politik bukan terletak pada pendanaan melainkan pada kesadaran. Hal ini diartikan program GP Ansor dapat berjalan melalui kesadaran para kader untuk mengikuti kegiatan walaupun dalam kegiatan yang sederhana seperti diskusi, pengajian, dan pengaderan. Program pengaderan yang selalu memakan waktu yang cukup lama dapat terlaksana karena seluruh pengurus memiliki kesadaran untuk melaksanakan kegiatan meskipun tanpa berpikir pendapatan yang bersifat ekonomi. Begitu pula dengan para instruktur yang mengisi acara pengaderan menghadiri atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya untuk memajukan organisasi.

Kendala pendanaan ini menjadi dasar diadakannya pelatihan BMT dengan tujuan untuk membentuk kemandirian organisasi yang tidak bergantung pada bantuan pihak lain. Melalui BMT ini diharapkan membentuk kader yang mandiri secara ekonomi dan memiliki kesadaran akan pentingnya ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Pelatihan ini yang memberikan kesadaran bagi para kader untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan politik GP Ansor.

Kendala lain yang dianggap memiliki persentase besar adalah pesatnya teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan kedewasaan kader. Kehidupan di dunia maya seakan menjadi lebih penting dari pada dunia nyata. Informasi yang datang melalui dunia maya terlalu dijadikan referensi utama meskipun belum bisa dipertanggungjawabkan, sehingga berdampak sering terjadinya kesalahpahaman komunikasi diantara para anggota organisasi. Tidak dimungkiri bahwa teknologi informasi sangat dirasakan nilai manfaatnya namun juga dampak kemadaratannya beriringan datang bersama kemanfaatannya. Untuk meminimalisir permasalahan ini maka yang dilakukan GP Ansor adalah memperkuat ukhuwah antar anggota dan menjadi bahan kajian dalam setiap diskusi organisasi. Bagi GP Ansor, kendala-kendala yang dihadapi seperti yang disebutkan tersebut bukan hanya menjadi masalah melainkan menjadi bahan pembelajaran yang harus dipecahkan bersama-sama. Pendidikan politik bukan hanya bertujuan menjadikan pemuda Ansor yang memahami dan mampu bertindak politis, namun juga mampu menjadi solusi atas permasalahan yang muncul dalam lingkungan dan menjadi lebih dewasa menyikapi masalah-masalah tersebut.

Dalam ajaran agama Islam, ulama memiliki peran penting sebagai penerus para nabi untuk menyampaikan nilai-nilai ketuhanan kepada umat manusia. GP Ansor sebagai salah organisasi

kepemudaan yang bernapaskan keagamaan (Islam) memegang teguh ajaran tersebut sehingga ulama NU memiliki posisi yang sangat penting dalam segala kehidupan organisasi. Posisi ulama ini terdapat dalam hierarki kepengurusan yang paling atas baik sebagai pembina maupun sebagai pengasuh.

Ulama NU dalam sejarah kemerdekaan Indonesia memiliki komitmen besar terhadap Indonesia. Sikap nasionalisme yang ditunjukkan oleh ulama NU menjadi dasar pergerakan para pemuda Islam untuk berjuang melawan penjajahan yang terjadi pada bangsa saat itu. Catatan sejarah ini menjadi acuan tindakan pelaksanaan pendidikan politik GP Ansor dengan menempatkan ulama sebagai sosok teladan bagi seluruh pemuda Ansor. Keteladanan tersebut meliputi pola tingkah laku dan ucapan lisan yang baik. Dalam konteks pendidikan politik, karakter keteladanan ulama menjadi modal pembelajaran perilaku politik bagi para pemuda Ansor. Sikap keteladanan ulama menjadi salah satu sumber pembelajaran pendidikan politik bagi GP Ansor. Keteladanan ulama berlandaskan nilai Islam dan Indonesia juga berdampak pada efektifitas hasil pendidikan politik GP Ansor. Seperti diungkap Batawi (2013, hal. 30) yang menyebutkan bahwa “pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila”.

Keteladanan ulama NU menyampaikan nilai Islam dan budaya bangsa menjadi model pendidikan politik yang terletak pada kesadaran akan peran ulama dalam menunjukkan partisipasi terhadap kemajuan dan pemecahan permasalahan bangsa berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa. Mengingat komitmen NU terhadap Indonesia, aplikasi peran ulama dibuktikan dengan memberikan contoh bagi para anggota GP Ansor dalam menyikapi kondisi bangsa. Peran lain yang ditunjukkan ulama adalah menjadi pengisi acara pengajian dan kajian terkait Islam dan Indonesia melalui pembelajaran yang menekankan pemahaman Islam yang dihadapkan pada karakteristik bangsa yang beranekaragam. Melalui pembelajaran ditujukan dalam memberikan dorongan kepada pemuda Ansor untuk membentuk situasi politik yang mencerminkan pluralistik seperti yang terkandung dalam Pancasila. Maliki (2010, hal. 179) mengatakan kondisi yang diyakini bisa memperkuat budaya politik pluralistik yaitu (1) wawasan kebangsaan yang tidak mematikan pluralisme, (2) budaya multikultural yang kuat, (3) penyelenggara birokrasi pemerintah yang terbuka, (4) generasi yang mewarisi budaya positif untuk pluralisme politik, dan (5) komunitas agama yang toleran dan kohesif.

Indonesia akan menjadi negara yang kuat jika warga negaranya memahami keanekaragaman bangsa yang didasari pemahaman pluralisme dan mampu menerapkan sikap yang toleran antar penganut agama. Sikap keteladanan ulama dalam menerapkan sikap toleransi keberagaman agama selanjutnya dijadikan sumber referensi materi kerohanian maupun materi teknis perubahan dalam menyikapi kondisi kebangsaan. Prinsip toleransi ini merupakan aplikasi dari ajaran Islam yakni Islam sebagai *Rahmatan Lil ‘Alamin*. Pembelajaran ini dicerminkan dalam beberapa kegiatan pengajian ketika ulama memberikan pemahaman kebangsaan yang dikaitkan dengan ajaran Islam kepada pemuda Ansor. Selain itu, dalam pengajian ini pula ulama memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Ansor dengan berdasarkan pada Alquran dan hadis serta memberikan langkah aplikatif sesuai dengan kondisi dan karakteristik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para ulama NU akan pentingnya memperbaiki bangsa Indonesia namun dengan cara yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. perilaku ulama seperti ini secara tersurat maupun tersirat menunjukkan pentingnya sikap nasionalisme yang harus ditunjukkan oleh pemuda Ansor sehingga menjadi modal pembelajaran akan pentingnya nasionalisme yang ditunjukkan oleh para ulama.

Ideologi Pancasila merupakan dasar nasionalisme Indonesia di dalamnya tidak terlepas dari nilai-nilai agama dan budaya sehingga penyampaian materi yang dilakukan oleh ulama NU dan penyelenggaraan pendidikan politik oleh GP Ansor terkait materi keislaman dan keindonesiaan harus sesuai dengan ideologi tersebut. Hal ini menjadi dasar utama dalam penyampaian materi keindonesiaan yang diselenggarakan oleh GP Ansor melalui materi ulama. Peran ulama yang selanjutnya adalah membimbing dan membina organisasi dan anggota GP Ansor. Hal ini tercerminkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh GP Ansor selalu diawali dengan konsultasi dan atas arahan dari ulama. Biasanya ulama memberikan pertimbangan moral religius bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan terlebih doa restu yang sangat diharapkan oleh seluruh anggota GP Ansor. Peran besar ulama dalam membimbing dan membina dirasakan sangat besar oleh GP Ansor dalam setiap kegiatannya.

Pengalaman yang disampaikan oleh GP Ansor ini menunjukkan bahwa ulama memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan politik dengan menekankan pada perilaku yang berdasar pada sikap nasionalisme sesuai dengan karakteristik Indonesia. Hal ini menjadi modal besar dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemuda Ansor sehingga mampu menjadi warga negara yang religius dan nasionalis. Hal ini dikarenakan fenomena dewasa ini banyak terjadi kecenderungan perilaku yang diakui sebagai ajaran agama namun justru melupakan kondisi bangsa. Terlalu berisiko jika kondisi seperti terus terjadi pada bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik multikultural dan plural akan berdampak pada perpecahan bangsa yang teramat besar. Oleh karena itu, peran ulama menjadi suri teladan, pembimbing, dan pembina sangat diperlukan oleh bangsa ini. Hal ini yang mendasari GP Ansor untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang bertujuan untuk menciptakan pemuda menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap agama dan Indonesia sesuai dengan prinsip NU yang memiliki komitmen terhadap Islam dan persatuan Indonesia.

Simpulan

GP Ansor sebagai organisasi kader memandang bahwa pendidikan politik merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan agar tercipta kader yang memahami politik sebelum terjun di lapangan. Begitu pula kader haru diberikan pemahaman pula terkait nasionalisme sebagai dasar tindakan politik yang didasari hadis *Hubbul Wathan Minal Iman*. Oleh karena itu pendidikan politik dan nasionalisme harus disampaikan pada para kader agar mampu menjalankan kehidupan politik selaras dengan ajaran NU. Adapun pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan GP Ansor Kabupaten Karawang meliputi Pelatihan Kader Dasar dan pengembangan kader. Adapun penyelenggaraan pendidikan politik lainnya melalui program pengembangan kader yang dilakukan dalam bentuk diskusi, pelatihan pengembangan profesi, pendidikan bela negara, dan pelatihan ekonomi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Selain menyelenggarakan pengaderan dan pengembangan, penyelenggaraan pendidikan politik juga ditentukan oleh peran ulama Nahdhatul Ulama. Peran ulama meliputi keteladanan, pengisi materi Islam dan Indonesia, serta menjadi pembimbing dan pembina organisasi kepemudaan GP Ansor Kabupaten Karawang.

Referensi

- Amnå, E., Ekström, M., Kerr, M., & Stattin, H. (2009). Political socialization and human agency: The development of civic engagement from adolescence to adulthood. *Statsvetenskaplig tidskrift*, 111(1), 27–40.
- Andersson, E. (2020). A transactional and action-oriented methodological approach to young people's political socialisation. *Education, Citizenship and Social Justice*, 15(3), 243–257. <https://doi.org/10.1177/1746197919853807>

- Arpanudin, I., & Aulia, S. S. (2020). Citizenship and democracy: How young citizen behave democratically in digital age. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418(Acec 2019), 391–395. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.074>
- Batawi, J. W. (2013). Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada. *Jurnal UNIERA*, 2(2), 26–52.
- Fakih, F. (2014). Akar-akar Kanan daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesenjariannya. *Lembaran Sejarah*, 11(1), 37–49. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23782>
- Ghozali, I. (2020). Political and nationalism of GP Ansor in facing the perssecution of kirab satu negeri in The Meranti Islands. *Al-Tahrir*, 20(2), 307–328. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i2.2131>
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Kurniadi, B. (2019). *Indonesia Political Development : Democracy , Political Parties in the Political Education Perspective*. 66–70. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/613/429>
- Lan, T. J., & Manan, M. (2011). *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia: Sebuah pengantar*. LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi politik: Makna kekuasaan dan transformasi politik*. Gadjah Mada University
- Nilgun, D., Mehmet, A. S., & Burcu, S. (2015). Political education in school. *Educational Research and Reviews*, 10(14), 1881–1887. <https://doi.org/10.5897/err2015.2330>
- Roberts, D. D. (2010). Fascism, Marxism, and the question of modern revolution. *European Journal of Political Theory*, 9(2), 183–201. <https://doi.org/10.1177/1474885109355889>
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi mewujudkan budaya politik pancasila (Studi deskriptif terhadap organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 25(1), 24. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3668>
- Smith, A. D. (2002). *Nationalism: Theory, ideology, history*. Wiley.
- Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran. (2016). Peran organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi pemuda (Studi pada pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 180–198.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic education and learning democracy: Their importance for political participation of young people. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174(286), 544–549. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.703>